

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAHI**

RENJA

**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAHI TA 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan sektor Perhubungan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan di daerah, isu-isu kerja pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2024 ini tidak lepas dari partisipasi dan dukungan dari semua pihak yang terkait, untuk itu perkenankanlah kami untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2024 ini. Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Besar harapan kami bahwa Dinas Perhubungan Kota Cimahi bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

Cimahi, 26 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAH,**



RUSWANTO, ATD, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19691018 199403 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	70
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	80
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	83
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	94
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	96
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	96
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	98
3.3 Program dan Kegiatan	100
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	115
BAB V PENUTUP	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang berisi rencana pembangunan tahunan daerah. Selain itu Undang-Undang ini mengatur keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD. Undang-undang ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja SKPD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Perhubungan Kota Cimahi sebagai perangkat Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) tentang Dinas Daerah Kota Cimahi, dan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, dalam rangka meningkatkan kinerja, melakukan evaluasi dan analisis kajian berdasarkan data kuantitatif dan kinerja untuk bahan perumusan strategi pengembangan ke depan dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Kota Cimahi.

Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.1.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi

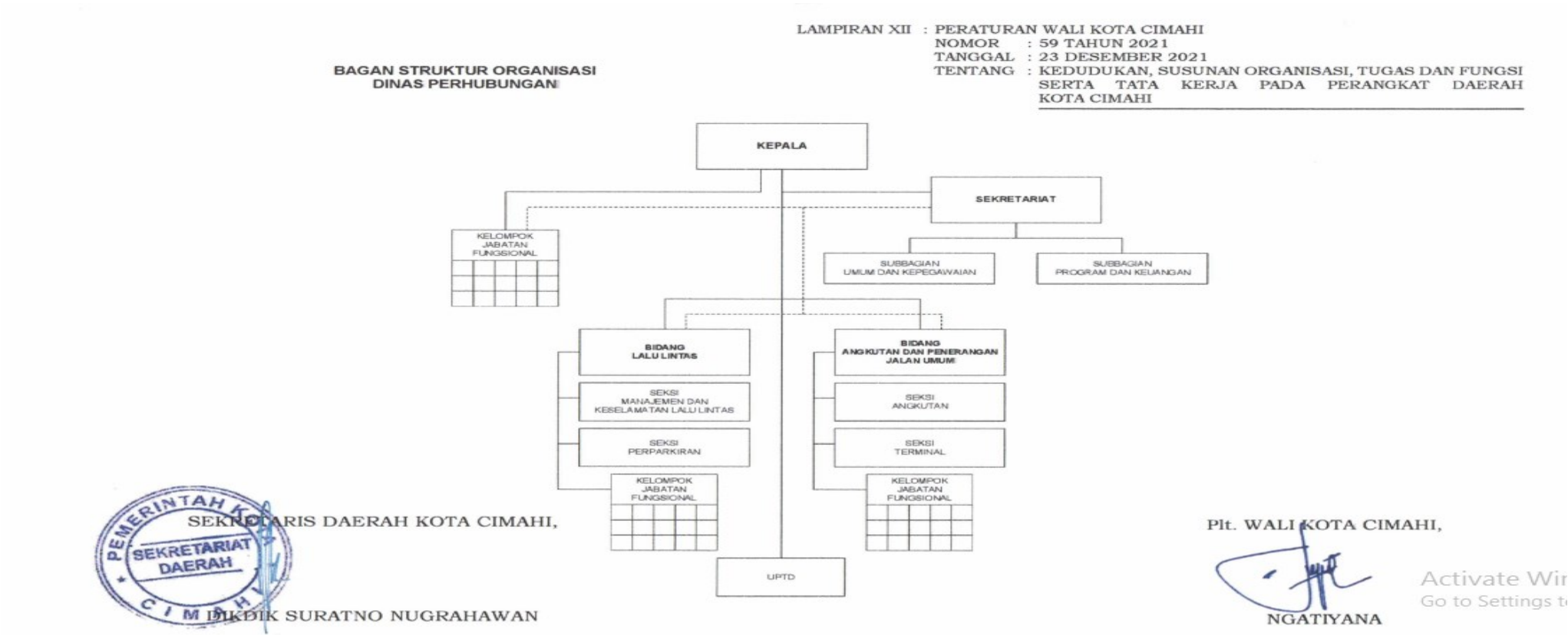
Dinas Perhubungan Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) tentang Dinas Daerah Kota Cimahi, dan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan (Pasal 91–Pasal 94), terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program dan Keuangan.
2. Bidang Lalu Lintas;
 - a. Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas;
 - b. Seksi Perparkiran; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Angkutan dan Penerangan Jalan Umum;
 - a. Seksi Angkutan;
 - b. Seksi Terminal; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. UPTD; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Pasal 95 Lampiran XII, di bawah ini adalah Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi.



1.1.3 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Dinas Perhubungan Kota Cimahi didukung dengan Sumber Daya Manusia, sebagai berikut :

1. PNS : 58 orang
 2. THL : 67 orang
 3. PPPK : 1 orang
- Jumlah : **126 orang**

Pegawai Dinas Perhubungan Kota Cimahi berdasarkan Gender pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dishub Kota Cimahi berdasarkan Gender

No	Gender	Tahun 2023
1.	Laki-laki (L)	106
2.	Perempuan (P)	20
JUMLAH		126

Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Cimahi berdasarkan Pangkat / Golongan pada tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai (PNS) berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Gol	Tahun 2023
1.	IV c	-
2.	IV b	1
3.	IV a	4

No	Pangkat/Gol	Tahun 2023
4.	III d	7
5.	III c	3
6.	III b	8
7.	III a	9
8.	II d	23
9.	II c	3
10.	II b	-
11.	II a	-
12.	I d	-
13.	I c	-
14.	I b	-
15.	I a	-
JUMLAH		58

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik I - 7 Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retibusi;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan;
 10. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan;
 11. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
 12. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 452);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 27. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
34. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
37. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's Daerah

Provinsi Tahun 2018-2023;

38. Peraturan Daerah Kota Cimahi No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Dinas Perhubungan di Kota Cimahi;
39. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
40. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi;
41. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
43. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
44. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
45. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016);
46. Peraturan Daerah kota Cimahi Nomor 2 tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha;
47. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 288);
48. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);

49. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 660, Tambahan Berita Daerah Nomor 140)
50. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139)
51. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum;
52. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Terminal;
53. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kendaraan Wisata Cimahi;
54. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 645);
55. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 551/Kep.1611 – Dishub/2019 tentang Jaringan Trayek Perkotaan;
56. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2020 tentang tarif retribusi jasa umum;
57. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2020 tentang tarif retribusi jasa usaha;
58. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Cimahi ini adalah Memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah :

- a. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
- b. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
- c. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2024, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara keseluruhan realisasi kinerja pada Triwulan II pagu anggaran sebesar Rp. 41.675.379.432,- dan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 12.957.178.637,- dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 31,09 % dan pencapaian realisasi fisik sebesar 39,94 % seperti yang tertera pada Tabel 2.1. Pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) program dalam mendukung kegiatan : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, dengan di dukung oleh 7 (tujuh) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota serta 9 (sembilan) kegiatan teknis Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan pendukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dibiayai dan menjadi garapan wajib Dinas Perhubungan Kota Cimahi dengan dalam mewujudkan Tujuan Dinas.

Terkait dengan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
		Persentase fasilitas lalu lintas yang layak		86,53 Persen	67,00 Persen	61,25 Persen	91,42%			
		Persentase angkutan yang layak jalan		83,23 Persen	95,00 Persen	83,23 Persen	87,61%			

		Persentase penurunan titik kemacetan		26,67 Persen	30,00 Persen	26,67 Persen	88,90%			
		Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum		78,09 Persen	78,09 Persen	78,09 Persen	100,00 %			
		Persentase tersedianya halte dan terminal		0,00 Persen	0,00 Persen	0,00 Persen				
		Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	55%					50 Persen		
		Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Layak	86%					83 Persen		
		Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	64%					50 Persen		
		Rasio Konektivitas Kota	0,64					0,64 Rasio		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota									
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi sarana prasarana perlengkapan jalan		66,06 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %			
		Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota						4 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota									

		Jumlah Pengadaan Titik PJL		56 Titik	150 Titik	76 Titik	50,67 %			
		Jumlah Pengadaan Titik PJG		863 Titik	800 Titik	553 Titik	69,13 %			
		Jumlah Pengadaan Titik PJU		0 -	50 Titik	8 Titik	16,00 %			
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun						203 1 Unit	0 Unit	0,00%
2.15.02. 2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota									
		Jumlah Bulan Pembayaran THL		12 Bulan						
		Jumlah penyediaan alat pengaman dan pengendalian keselamatan lalu lintas (water barrier, traffic cone, dan sejenisnya)		92 buah						
		Jumlah penyediaan cermin tikung		8 buah	12 buah	12 buah	100,00 %			
		Jumlah penyediaan rambu papan tarif parkir		5 buah						
		Jumlah penyediaan speed bumper		72 buah						

		Jumlah penyediaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)		0 Set						
		Jumlah pengadaan Marka Putih Thermoplast		717 Meter Persegi	12 Buah	12 Buah	100,00 %			
		Jumlah pengadaan Marka ZOSS		3 Lokasi	717 Meter Persegi	1127 Meter Persegi	157,18 %			
		Jumlah pengadaan Rambu-Rambu 75 x 75 cm		20 Buah	3 Lokasi	6 Lokasi	200,00 %			
		Jumlah pengadaan Road Barrier			25 Buah	25 Buah	100,00 %			
		Jumlah pengadaan speed bumper			35 Buah	35 Buah	100,00 %			
		Jumlah pengadaan Speed Trap			200 Meter Persegi	850 Meter Persegi	425,00 %			
		Jumlah pengadaan traffic cone			120 Buah	120 Buah	100,00 %			
		Jumlah pengadaan water barrier			20 Buah	20 Buah	100,00 %			
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia						77 Unit	20 Unit	25,97%
2.15.02. 2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan									
		Jumlah Titik PJU yang dipelihara		1296 Titik	150 Titik	150 Titik	100,00 %			

		Jumlah Titik PJJ yang dipelihara		1127 Titik	860 Titik	860 Titik	100,00 %			
		Jumlah Titik PJG yang dipelihara		3790 Titik	3650 Titik	4558 Titik	124,88 %			
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara						482 8 Unit	16 59 Unit	34,36%
2.15.02. 2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
		Jumlah APILL yang dipelihara		1 Unit						
		Jumlah CCTV yang dipelihara		10 Titik						
		Jumlah Rambu Lalu Lintas yang dipelihara		22 buah						
		Jumlah Rambu Papan Tarif Parkir yang dipelihara		1 Paket						
		Jumlah Shelter/Halte yang dipelihara		6 Unit						
		Jumlah Pemeliharaan Marka Thermoflast		410 Meter Persegi						
		Jumlah Pemeliharaan Marka ZOSS		0 Meter Persegi						
		Jumlah Pengadaan CCTV (Jl.Amir Machmud)		0 Paket						
		Jumlah Rapat Persiapan dan Evaluasi		0 Kali/bulan						

		Jumlah Bulan sewa fiber optik		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			
		Jumlah cermin tikung yang dipelihara		5 buah	6 Buah	6 Buah	100,00 %			
		Jumlah kegiatan monitoring pemeliharaan perlengkapan jalan		0 Kegiatan						
		Jumlah pemeliharaan portal fly over padasuka		2 Titik						
		Jumlah M2 pemeliharaan marka warna		254 meter persegi						
		Jumlah pengadaan TV ruang CCTV		1 buah						
		Jumlah Daun Rambu ukuran 75 x 75 yang dipelihara			50 Buah	50 Buah				
		Jumlah 8 Titik CCTV yang dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara						59 Unit	29 Unit	49,15%
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									
		Persentase terminal tipe C yang dikelola		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %	100 Persen	50 Persen	50,00%

2.15.02. 2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal									
		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Terminal		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			
		Jumlah Bulan Sewa Terminal Pasar Antri		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			
		Jumlah panjang pagar terminal		13,34 meter persegi						
		Jumlah pengadaan papan nama terminal		1 Unit						
		Jumlah tenda portable		0 buah						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan						3 Unit	1 Unit	33,33%
2.15.02. 2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)									
		Jumlah Gedung Terminal Tipe C yang dipelihara		3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	100,00 %			
		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara						3 Unit	1 Unit	33,33%
2.15.02. 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan									

	dan Pembangunan Fasilitas Parkir									
		Jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%
2.15.02. 2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Kegiatan Monitoring Parkir		18 Kegiatan						
		Jumlah Kegiatan Penegakan Hukum Parkir		1 Kegiatan						
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Parkir di Area CFD		0 Kegiatan						
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Parkir		2 Kegiatan						
		Jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %			

		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						16 Lapo ran	8 Lapora n	50,00%
2.15.02. 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
		Jumlah pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa LLAJ		3 Kegiat an	3 Kegiat an	3 Kegiatan	100,00 %			
		Jumlah Kegiatan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa LLAJ						3 Kegiat tan	0 Kegiat an	0,00%
2.15.02. 2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas di Area CFD		0 Kegiat an						

		Jumlah Kegiatan TC 15 Ruas Jalan Kota Cimahi		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %			
		Jumlah Kegiatan TC Lebaran		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %			
		Jumlah Kegiatan Lomba Tertib Berlalu Lintas Tingkat RW di Kota Cimahi		0 Kegiatan						
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Untuk Pelajar		0 Kegiatan						
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Perlombaan Dalam Rangka Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Untuk SLTA		0 Kegiatan						
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas		1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %			
		Jumlah Kegiatan Monev Keselamatan Berlalu Lintas		0 Kegiatan						
		Jumlah kajian inventaris perlengkapan jalan di ruas 6 jalan		1 Dokumen						

		Jumlah kegiatan kajian titik lokasi parkir on street di Kota Cimahi		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %			
		Jumlah kajian analisis kebutuhan perlengkapan jalan			1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%			
		Jumlah kajian uji potensi parkir			2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %			
		Jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan Berjalan Lintas untuk pelajar			2 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%			
		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						6 Laporan	2 Laporan	33,33%
2.15.02. 2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Kegiatan Uji Coba Underpass		1 Kegiatan						
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan CFD dan Pelaksanaan Piket Sabtu Minggu		52 Kegiatan						

		Jumlah Kegiatan Piket Hari Libur Nasional		4 Kegiatan						
		Jumlah Kegiatan Rekayasa Insidentil		7 Kegiatan						
		Jumlah Kegiatan Monitoring Rekayasa		4 Kegiatan						
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rekayasa Underpass		0 Kegiatan						
		Jumlah kegiatan pelaksanaan piket sabtu- minggu mengurai kemacetan lalu lintas			30 Kegiatan	42 Kegiatan	140,00 %			
		Jumlah kegiatan pengawasan insidentil lalu lintas			11 Kegiatan	21 Kegiatan	190,91 %			
		Jumlah kegiatan rekayasa lalu lintas (Underpass Gatot Subroto, GOR Sangkuriang)			2 Kegiatan	Kegiatan	0,00%			
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						14 Dokumen	8 Dokumen	57,14%

2.15.02. 2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota									
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		3 Kegiatan	4 Kegiatan	6 Kegiatan	150,00 %			
		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota						4 Laporan	2 Laporan	50,00%
2.15.02. 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota									
		Jumlah dokumen hasil analisis Andalalin		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00 %	6 Dokumen	3 Dokumen	50,00%
2.15.02. 2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin									
		Jumlah Dokumen Rekomendasi ANDALALIN yang ditetapkan		4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00 %			
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan						6 Dokumen	1 Dokumen	16,67%
2.15.02. 2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin									

		Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi						12 Lapo ran	2 Lapora n	16,67%
2.15.02. 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									
		Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan		4 Kegiata n	4 Kegiat an	4 Kegiatan	100,00 %	4 Kegiat tan	1 Kegiat an	25,00%
2.15.02. 2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal									
		Jumlah Kegiatan Audit dan Pemantauan Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Lokal di Terminal		1 Kegiata n						
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi Operasi Penegakan Hukum di Terminal		0 Kegiata n						
		Jumlah kegiatan audit kendaraan angkutan umum yang tidak masuk ke terminal			1 Kegiat an	1 Kegiatan	100,00 %			
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal						3 Lapo ran	1 Lapora n	33,33%

2.15.02. 2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota									
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi Angkutan (Rampchek)		3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00 %			
		Jumlah Kegiatan Cek Kesehatan Sopir/Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum		0 Kegiatan						
		Jumlah Kegiatan Inspeksi Audit dan Pemantauan Penegakan Hukum Insidentil Keselamatan Angkutan Umum dan Barang		0 Kegiatan						
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan						3 Lapo ran	2 Lapora n	66,67%

		Bermotor Kabupaten/ Kota								
2.15.02. 2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum									
		Jumlah Audit Inspeksi dan Pemantauan Manajemen Keselamatan pada Perusahaan Angkutan Umum		5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00 %			
		Jumlah Kegiatan Inspeksi Audit dan Pemantauan Keselamatan Angkutan Berbasis Online yang Melintas di Kota Cimahi		0 Kegiatan						
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						4 Lapo ran	2	50,00%
2.15.02. 2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor									

		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		1 Kegiatan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	200,00 %			
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor						2 Laporan	1 Laporan	50,00%
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Kendaraan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang antar Kota		0 Kendaraan	8 Kendaraan	0 Kendaraan	0,00%			
		Jumlah Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan / Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kota						2 Kegiatan	8 Kendaraan	400,00 %

2.15.02. 2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						#DIV/ 0!			
		Jumlah Penyediaan Kendaraan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang (Mudik Gratis)		0 Kendaraan	8 Kendaraan	0 Kendaraan	0,00%	8 Unit	8 Unit	100,00 %
2.15.02. 2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota						#DIV/ 0!			
		Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota		5 Kegiatan						
		Jumlah kegiatan Operasi Penegakan Hukum Angkutan Umum di Jalan			5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00 %			

		Jumlah kegiatan Operasi Penegakan Hukum Angkutan Umum di Terminal			10 Kegiatan	10 Kegiatan	100,00 %			
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota						29 Laporan	12 Laporan	41,38%
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota									
		Jumlah kegiatan pengendalian jalan raya jaringan perkotaan		12 Kegiatan				1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%
		Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum			78,09 Persen	78,09 Persen	100,00 %			
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

		Jumlah Kegiatan Pengendalian Jalan Raya Jaringan Perkotaan		12 Kegiatan						
		Jumlah kegiatan pendataan trayek angkutan umum			12 Kegiatan	12 Kegiatan	100,00 %			
		Jumlah kegiatan pengawasan tertib angkutan umum di jalan			51 Kegiatan	51 Kegiatan	100,00 %			
		Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						12 Dokumen	6 Dokumen	50,00%
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
		Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala		5200 Kendaraan	5200 kendaraan	5200 kendaraan	100,00 %	4400 kendaraan	0 kendaraan	0,00%
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia						10 Unit	8 Unit	80,00%

2.15.02. 2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
		Jumlah SDM Pengujian Kendaraan Bermotor (ADM dan Penguji) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0 Orang	1 orang	0 orang	0,00%			
2.15.02. 2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor									
		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala yang teregistrasi berkala kendaraan bermotor		5200 Kendar aan						
		Jumlah pemasangan alat pemantau kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala secara teregistrasi			4 titik	4 titik	100,00 %			
		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar						916 7 Unit	45 00 Unit	49,09%

2.15.02. 2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
		Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		5200 smartcard	4400 buah	0 buah	0,00%			
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						4400 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2.15.02. 2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%			
		Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						1 Laporan	0 Laporan	0,00%
2.15.02. 2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji									

		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		2 Dokum en				2 Lapo ran	1 Lapora n	50,00%
		Jumlah dokumen pendapatan asli daerah pengujian kendaraan bermotor			2 Doku men	2 Dokume n	100,00 %			
2.15.02. 2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
		Jumlah Gedung yang dilakukan Pemeliharaan		1 Gedun g	1 Gedun g	1 Gedung	100,00 %			
		Jumlah Alat Uji yang dilakukan Pemeliharaan		11 alat	11 alat	11 alat	100,00 %			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara						12 Unit	3 Unit	25,00%
2.15.02. 2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
		Jumlah Triwulan Pelaksanaan Monev Penyelenggaraan		4 Triwula n						

		Pengujian Kendaraan Bermotor								
		Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor			4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00 %			
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						4 Laporan	2 Laporan	50,00%
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai		BB Nilai	Nilai	
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %			
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 %			

		Indeks Profesionalitas ASN	50,50 Nilai					50 Nilai	Nilai	0,00%
		Nilai IKM Perangkat daerah	77,50 Nilai					77,25 Nilai	Nilai	0,00%
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Nilai LAKIP		74,55 Indeks						
		Jumlah dokumen perangkat daerah		16,00 Dokumen						
		Jumlah dokumen perencanaan dan monev PD yang disusun			16,00 Dokumen	16,00 Dokumen	100,00 %			
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah						22 Dokumen	6 Dokumen	27,27%
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						#DIV/0!			
		Jumlah Dokumen Anggaran		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %			
		Jumlah Dokumen Renja		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %			
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %			
		Jumlah Kegiatan Forum Perangkat Daerah		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %			
		Jumlah Dokumen Renstra			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %			

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8 Dokumen	2 Dokumen	25,00%
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen IKM		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %			
		Jumlah Dokumen LKIP		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %			
		Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %			
		Jumlah Dokumen Monev Kinerja Triwulanan		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %			
		Jumlah Dokumen SOP		1 Dokumen						
		Jumlah Dokumen SPIP			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %			
		jumlah buku profil PD			0 Buku	45 Buku				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14 Laporan	4 Laporan	28,57%
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Persentase Realisasi Anggaran		83,62 Persen						
		Persentase Realisasi Keuangan		83,62 Persen						
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan			10 Dokumen	13 Dokumen	130,00 %			

		Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12 Bulan	6 Bulan	50,00%
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah ASN yang terfasilitasi Gaji dan Tunjangan		71 Orang						
		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Dishub			14 Bulan	14 Bulan	100,00 %			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						66 Orang/bulan	60 Orang/bulan	90,91%
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan	0 Laporan	0,00%

2.15.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan		8 Dokum en	9 Doku men	12 Dokume n	133,33 %			
		Jumlah Dokumen Laporan Semesteran Keuangan		1 Dokum en						
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						13 Lapo ran	5 Lapora n	38,46%
2.15.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
		Persentase ASN yang Dibina		85 Persen						
		Jumlah pegawai		138 Pegawa i	150 Orang	150 Orang	100,00 %			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan						129 Oran g	12 9 Orang	100,00 %

2.15.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
		Jumlah stel pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		138 Stel						
		Jumlah stel pakaian dinas upacara besar		17 Stel						
		Jumlah buah jas hujan		145 buah						
		Jumlah pakaian olah raga		140 buah						
2.15.01. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah pegawai yang tersosialisasi		67 Pegawai	150 Pegawai	150 Pegawai	100,00 %			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						129 Orang	129 Orang	100,00 %
2.15.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Persentase Sarana dan Prasarana yang Dipelihara		100 Persen						

		Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan				12 Bulan	6 Bulan	50,00%
2.15.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	0 Paket	0,00%
2.15.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Bulan Penyediaan ATK		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						2 Paket	0 Paket	0,00%
2.15.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Kantor		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 Paket	0 Paket	0,00%
2.15.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		Jumlah Bulan Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	0 Paket	0,00%
2.15.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Aturan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2.15.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Bulan Penyediaan Jamuan Kunjungan Tamu		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			

		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						12 Lapo ran	6 Lapora n	50,00%
2.15.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Bulan Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Lapo ran	6 Lapora n	50,00%
2.15.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Persentase Sarana dan Prasarana yang Dipelihara		82 Persen						
		Jumlah Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan						60 Unit	41 Unit	68,33%
2.15.01. 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor yang Disewa		1 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	100,00 %			

		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						2 Unit	2 Unit	100,00 %
2.15.01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Pengadaan Kursi		23 buah	35 buah	35 buah	100,00 %			
		Jumlah Pengadaan Tangga Lipat		1 buah						
		Jumlah Pengadaan Lemari Arsip		6 buah						
		Jumlah Pengadaan Komputer		10 Unit						
		Jumlah Pengadaan Printer		2 Unit	4 Unit	4 Unit	100,00 %			
		Jumlah Pengadaan Scanner		1 Unit	5 Unit	5 Unit	100,00 %			
		Jumlah pengadaan lemari arsip kayu		0 buah						
		Jumlah pengadaan laptop		1 Unit						
		Jumlah pengadaan in focus		1 Unit						
		Jumlah pengadaan dispenser			2 Unit	2 Unit	100,00 %			
		Jumlah pegadaan keyboard			2 Buah	2 Buah	100,00 %			
		Jumlah pengadaan meja			2 Buah	2 Buah	100,00 %			

		Jumlah pengadaan meja 1/2 biro			1 Buah	1 Buah	100,00 %			
		Jumlah pengadaan mouse			2 Buah	2 Buah	100,00 %			
		Jumlah pengadaan rak besi			30 Buah	30 Buah	100,00 %			
		Jumlah pengadaan sound card			0 Buah	1 Buah				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						58 Unit	39 Unit	67,24%
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase Sarana dan Prasarana yang Dipelihara		82 Persen						
		Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	12 Bulan		0,00%	12 Bulan	6 Bulan	50,00%
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Bulan Jasa Air		0 -						
		Jumlah Bulan Jasa Komunikasi		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			

		Jumlah Bulan Jasa Listrik		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Lapo ran	6 Lapora n	50,00%
2.15.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Lapo ran	6 Lapora n	50,00%
2.15.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase Sarana dan Prasarana yang Dipelihara		82 Persen						
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %	12 Bula n	6 Bulan	50,00%

2.15.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						32 Unit	21 Unit	65,63%
2.15.01. 2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12 Bulan						

		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						56 Unit	23 Unit	41,07%
2.15.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %			
2.15.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						56 Unit	23 Unit	41,07%

2.1.1. Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Triwulan II TA. 2023

A. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 639.844.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 123.398.700,- dengan rata – rata pencapaian fisik 19,95% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 19,29%. Penyerapan anggaran masih rendah dikarenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kab/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.325.155.622,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.779.102.022,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 11,57 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 1,88%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

c. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.312.712.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 475.016.590,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 71,93 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 20,54%.

Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

d. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 872.615.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 210.987.850,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 45,89% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 43,21%. Penyerapan anggaran masih rendah dikarenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 554.979.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 255.691.387,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 48,36% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 46,07 %.

b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 69.347.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.387.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 50,40% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 48,14%.

3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 290.866.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 138.807.828,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 50,63 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 47,72 %. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

4. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

a. Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 368.168.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 112.820.954,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 37,64 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 30,64 %. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 488.317.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 210.987.850,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 45,89 % dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 43,21%.

c. Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.642.100,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 52,88% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 52,68%.

5. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 22.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.025.350,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 28,01 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 26,78 %.

6. Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLLA Di Jalan

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 23.166.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.005.100,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 100% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 99,31%.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 55.629.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.647.900,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 64,35 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 64,08%.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 17.414.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

10.036.500,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 58,59 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 57,63 %.

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 55.629.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.647.900,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 64,35 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 64,08%.

7. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 130.576.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 127.987.200,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 99,96 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 98,02 %. Penyerapan anggaran masih rendah dikarenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 413.256.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 134.506.868,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 36,12% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 32,55%.

8. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.804.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.054.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 48,68 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 48,60%.

9. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.902.270,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 100% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 99,80%. Penyerapan anggaran masih rendah dikarenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 26.718.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.976.500,- dengan pencapaian fisik sebesar 45,73% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 44,83%.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1110.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 0% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 0%. Penyerapan anggaran masih rendah dikarenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

d. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 19.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.590.465,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 85,41 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 70,97%.

e. Sub Kegiatan Identifikasi Dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.170.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 23,40 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 23,40 %. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

f. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.127.637.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 485.378.329,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 45,17 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 43,04 %. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

g. Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 26.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.388.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 32,64 dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 31,77%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 235.182.450,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.135.250,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 32,44 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 30,67%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 44.355.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.891.750,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 26,81 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 26,81 %. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.507.913.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.376.505.799,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 51,80 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 46,03 %. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 16.512.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.807.400,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 0% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 0%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan IV.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 46.800.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.807.400,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 31,05 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 29,50%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 41.442.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 0% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 0%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 77.853.550,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.143.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 100% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 73,40%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 10.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.636.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 38,00% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 24,75%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 60.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.657.800,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 50% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 22,67%.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 95.555.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.657.800,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 50,00% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 22,67%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 226.150.550,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.544.095,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 63,68 % dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 3,78%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang -Undangan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 28.944.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.670.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 41,46 % dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 33,41 %. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 600.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 25% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 10%.

g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 175.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 87.582.169,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 50,34 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 50,05 %. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 235.935.292,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 177.768.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 94,93 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 75,35%.

b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 58.071.590,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.139.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 100% dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 94,95 %.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.299.999.928,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.695.416.829,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 56,98 % dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 56,57%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 223.460.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 103.818.200,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 49,06 % dan pencapaian realisasi keuangan sebesar 46,46%.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.185.094.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 279.582.550,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 41,61 % dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 23,59%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 39.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.290.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 50%

dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 36,64%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2023 (sampai dengan triwulan II) dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan II
Dinas Perhubungan Tahun 2023

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET Rp.	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %
			Rp.	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	235.182.450,00	72.135.250,00	30,67	32,44
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.355.000,00	11.891.750,00	26,81	26,81
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.512.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	46.800.400,00	13.807.400,00	29,50	31,05
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	41.442.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	77.853.550,00	57.143.000,00	73,40	100,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.650.000,00	2.636.000,00	24,75	38,00

8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	17.455.300,00	29,09	32,18
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.555.000,00	21.657.800,00	22,67	50,00
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	226.150.550,00	8.544.095,00	3,78	63,68
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.944.000,00	9.670.000,00	33,41	41,46
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	600.000,00	10,00	25,00
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000,00	87.582.169,00	50,05	50,34
14	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	235.935.292,00	177.768.000,00	75,35	94,93
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.071.590,00	55.139.000,00	94,95	100,00
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.299.999.928,00	4.695.416.829,00	56,57	56,98
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223.460.000,00	103.818.200,00	46,46	49,06
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.185.094.000,00	279.582.550,00	23,59	41,61
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.000.000,00	14.290.000,00	36,64	50,00
20	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.507.913.250,00	4.376.505.799,00	46,03	51,80
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
21	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	554.979.300,00	255.691.387,00	46,07	48,36

22	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	69.347.000,00	33.387.000,00	48,14	50,40
23	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	23.166.000,00	23.005.100,00	99,31	100,00
24	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	13.325.155.622,00	250.525.318,00	1,88	11,57
25	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	2.312.712.700,00	475.016.590,00	20,54	71,93
26	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	55.629.900,00	35.647.900,00	64,08	64,35
27	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	17.414.800,00	10.036.500,00	57,63	58,59
28	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	130.576.400,00	127.987.200,00	98,02	99,96
29	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	413.256.000,00	134.506.868,00	32,55	36,12

30	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.804.700,00	12.054.000,00	48,60	48,68
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	290.866.800,00	138.807.828,00	47,72	50,63
32	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	639.844.000,00	123.398.700,00	19,29	19,95
33	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	872.615.900,00	402.354.936,00	46,11	51,32
34	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	488.317.200,00	210.987.850,00	43,21	45,89
35	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	368.168.600,00	112.820.954,00	30,64	37,64
36	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	24.000.000,00	12.642.100,00	52,68	52,88
37	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	22.500.000,00	6.025.350,00	26,78	28,01
38	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	51.200.000,00	13.810.350,00	26,97	28,03
39	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	2.424.000,00	20,20	28,01
40	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	49.902.270,00	99,80	100,00

41	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	26.718.000,00	11.976.500,00	44,83	45,73
42	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19.150.000,00	13.590.465,00	70,97	85,41
44	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5.000.000,00	1.170.000,00	23,40	23,40
45	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.127.637.500,00	485.378.329,00	43,04	45,17
46	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	26.400.000,00	8.388.000,00	31,77	32,64
	JUMLAH	41.675.379.432,00	12.957.178.637,00	31,09	39,94

2.1.2. Evaluasi pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) s/d Triwulan II Tahun 2023

Sesuai dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, potensi pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi terdiri dari 4 jenis retribusi daerah, dengan total target /rencana pendapatan sebesar Rp. **1.710.500.000,-** Dari rencana target yang telah ditetapkan tersebut pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Cimahi dapat merealisasikan pendapatan daerah yang disetor ke kas daerah sampai dengan triwulan II sebesar Rp. **795.688.730,-** atau mencapai **46,52%**. Adapun Rincian jumlah pendapatan yang telah direalisasikan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3.
Realisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perhubungan Kota Cimahi s/d Triwulan II Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000.000,-	277.333.730,-	46,22
2	Retribusi Terminal	250.000.000,-	114.603.000,-	45,84
3	Retribusi Parkir On Street	850.000.000,-	394.302.000,-	46,39
4	Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	10.500.000,-	9.450.000,-	90,00
	JUMLAH	1.783.000.000,-	795.688.730,-	46,52

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DISHUB Kota Cimahi berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Perhubungan sesuai dengan PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Memahami bahwa tahun-tahun sebelumnya juga mengkaji capaian kinerja terkait SPM mengacu pada Permenhub Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; serta Permenhub Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota; mulai dari RENJA Tahun 2018 tidak lagi mengkaji indikator SPM.

Hal tersebut mendasari UU No. 23 Tahun 2014 bahwa SPM merupakan ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; sementara bidang perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Maka, pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2022 yang masuk ke dalam RPJMD 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi

No.	Indikator	Target Renstra Dishub				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)	C (0,72)	C (0,72)	C (0,72)	C (0,72)	C (0,46)	-	C (0,72)	C (0,72)

Dari data tabel diatas diartikan bahwa kinerja pelayanan Dinas Perhubungan mengalami **Peningkatan** pada kategori **C**, akan dari target capaian yang telah di ditetapkan. Dari target capaian sebesar **D** realisasi capaian menjadi **C** (0,46) sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Cimahi **Berhasil** meningkatkan tingkat kelancaran dan kenyamanan transportasi sesuai dengan tujuan pada IKK Misi 4 RPJMD 2017–2022.

Tabel 2.5
Tingkat Pelayanan Jalan/Level Of Service (LOS)
TA 2021 Dan 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Tingkat Pelayanan Jalan / Level Of Service (LOS)	C	C	0,46

Tabel 2.6
Kenaikan atau Penurunan Pencapaian LOSS TA 2020 – TA 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja TA. 2021	Tahun 2021		Capaian Kinerja TA. 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja TA. 2022
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Tingkat Pelayanan Jalan / Level Of Service (LOS)	C	C	0,72	C	C	0,66	C	C	0,46

Tahun 2022 Tipe Pelayanan sama dengan Tahun 2021. Pada Tahun 2021 Tipe pelayanannya **C** dengan LOS = **0,66** sedangkan pada tahun 2022 tetap **C** dengan LOS = **0,46**, meskipun berada pada Tingkat pelayanan **C** tetapi rangenya menurun dikarenakan ada titik-titik kemacetan yang kapasitas jalannya tidak bertambah tetapi jumlah kendaraan meningkat, tetapi Dinas Perhubungan melakukan upaya dengan adanya kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan Sistem Satu Arah (SSA) di beberapa jalan seperti di kawasan Dustira, yang meliputi Jl. Dustira, Jl. Baros, Jl. Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo dan Segitita Contong dan adanya alternative jalan Underpass di jalan Dustira sehingga dapat mengurai kemacetan yang menuju Jalan Sriwijaya atau Pasar Antri.

Dalam menghitung pengukuran kinerja adalah :

$$\text{Rata - rata LOS 15 Ruas Jalan} = \frac{\text{Jumlah LOS 15 Ruas Jalan}}{15} = \frac{6,9}{15} = 0,46$$

Data Pendukung

Tingkat Pelayanan

Batasan-batasan nilai dari setiap tingkat pelayanan dipengaruhi oleh fungsi jalan dan dimana jalan tersebut berada. Dengan tingkat pelayanan yang diperoleh, maka dapat ditentukan jalan tersebut masuk dalam tingkat pelayanan tertentu.

Adapun tingkat pelayanan (LOS) dilakukan dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{LOS} = V/C$$

LOS = Tingkat pelayanan jalan

V = Volume lalu lintas (smp/jam)

C = Kapasitas ruas jalan (smp/jam)

Tabel 2.7
Karakteristik Tingkat Pelayanan

Tingkat Pelayanan	Karakteristik-karakteristik	Kecepatan (Km/Jam)	Batas Lingkup (V/C)
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	>50	0.00 - 0.20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk pengemudi memilih kecepatan	40-50	0.21 – 0.44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	32-40	0.45 – 0.74

Tingkat Pelayanan	Karakteristik-karakteristik	Kecepatan (Km/Jam)	Batas Lingkup (V/C)
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dapat ditolerir	27-32	0.75 – 0.84
E	Volume lalu lintas mendekati/berada pada kapasitas. Arus tidak stabil kecepatan terkadang terhenti	24-27	0.85 – 1.00
F	Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume di bawah kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar	<24	>1.00

Tabel 2.8
Tingkat Pelayanan Jalan/Level Of Service (LOS)
15 Ruas Jalan di Kota Cimahi

No	Nama Jalan	Tipe Jalan	Kapasitas (Smp/jam)	Kecepatan (Km/jam)	Volume (Smp/jam)	Kepadatan	V/C (Smp/jam)	Tingkat Pelayanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jl. Daeng M Ardiwinata	2/2 UD	1.953	32,44	1047,61	37,88	0,54	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUM'AT
2.	Jl. Jl. Rd. Demang Hardjakus umah	2/2 UD	2.245	33,92	1218,92	50,94	0,54	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUM'AT
3.	Jl. Jati serut	2/2 UD	2.445	32,02	1304,59	57,16	0,53	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUM'AT

4.	Jl. Gandawija ya	4/2 UD	1.337	27,68	721,95	42,03	0,54	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUM'AT
5.	Jl. Lurah	4/2 UD	1.170	26,90	547,76	34	0,47	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
6.	Jl. Sisingama ngaraja	2/2 UD	2.045	37,75	600,76	24,47	0,29	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
7.	Jl. Kebon Kopi	2/2 UD	1.285	31,97	868,77	38,10	0,68	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari MINGGU
8.	Jl. Ranca bentang	2/2 UD	1.020	30,65	370,39	21,03	0,36	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari KAMIS
10.	Jl. Sadarmanah	2/2 UD	1.285	33,95	653,93	29,20	0,51	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari MINGGU

11.	Jl. Cibogo	2/2 UD	1.020	30,30	292,26	16,21	0,29	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari MINGGU
12.	Jl. Sudirman	4/2 UD	1.305	36,29	981	36,24	0,75	D	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari KAMIS
13.	Jl. Warung contong	2/2 UD	1.355	34,24	487,39	27,56	0,36	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
14.	Jl. Usman Dhomiri	2/2 UD	1.243	36,75	322,68	15,61	0,26	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
15.	Jl. Cipageran	2/2 UD	2.045	35,03	560,51	24,78	0,27	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
JUMLAH							6,9		

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian V/C Rasio Thn 2021	Tahun 2022		Capaian V/C Rasio Thn 2021
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Tingkat Pelayanan Jalan / Level Of Service (LOS)	C	C	0,66	C	C	0,46

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dikarenakan sebagai berikut :

- a) Adanya pelebaran jalan di depan pusdik armed cimahi untuk meminimalisasi kemacetan yang kerap terjadi di jalan baros khususnya di depan pusdik armed
- b) Adanya pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dengan diaktifkannya kembali Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di persimpangan Baros depan Pusdikarmed sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas.
- c) Adanya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dengan Sistem Satu Arah (SSA) di kawasan Dustira, yang meliputi Jl. Dustira, Jl. Baros, Jl. Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo dan Segitita Contong,
- d) Alternatif jalan Underpass di jalan dustira yang telah di resmikan oleh Gubernur Jawa Barat pada pertengahan tahun 2022 sehingga dapat mengurangi kemacetan dan adanya menjadi penurunan titik kemacetan dari tahun 2018 sebanyak 15 titik menjadi 13 titik pada tahun 2022

Dalam mempertahankan capaian atau meningkatkan nilai LOS dan nilai VCR, maka diperlukan upaya melalui penambahan kapasitas ruas jalan, persimpangan jalan (radius tikung), perlintasan kereta api tidak sebidang, menghitung tingkat pelayanan setiap ruas jalan, melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan Sistem Satu Arah (SSA), dan penanganan hambatan samping sehingga diharapkan dapat terjadi penurunan titik kemacetan.

Program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja karena pada program tersebut terdapat kegiatan yang meruapakan sektor perhubungan untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas, diantaranya :

a. Implementasi Pemasangan Rambu, Marka, Pagar dan Penerangan Jalan Umum

Salah satu upaya yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi khususnya Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan selamat adalah melalui pemasangan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka, pagar, penerangan jalan umum, dan lain sebagainya. Para pengguna jalan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi terlaksananya kelancaran dan keselamatan berlalu lintas. Dengan adanya Penerangan Jalan Umum sebagai bagian dari infrastruktur kota, seluruh jaringan jalan yang ada di Kota Cimahi perlu dilengkapi alat kelengkapan jalan yang memadai. Kondisi ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintahan Kota Cimahi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, khususnya para pengguna jalan dalam rangka menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan selamat.

b. Sektor Perparkiran

Pengguna jalan atau pengguna kendaraan dilarang parkir sembarangan supaya tidak terjadi kemacetan jika ada yang parkir liar ada tindakan dari dinas perhubungan seperti adanya kegiatan Gerakan penertiban perparkiran dan pengembokan roda kendaraan.

c. Sektor Pengawasan & Pengendalian Angkutan Umum

Adanya operasi penegaksn hukum angkutan umum di jalan raya, penertiban angkot yang tidak memiliki izin trayek dan uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang.

d. Sektor Pengujian Kendaraan Bermotor

Kendaraan Angkutan Umum diwajibkan melakukan wajib uji untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan, dishub kota cimahi guna memudahkan para pengusaha kendaraan angkutan umum dan barang sudah meggunakan Smartcard atau buku uji digital sehingga para wajib uji kendaraan dapat mengakses proses pendaftaran pengujian secara online dan mengurangi calo atau pungutan liar.

e. Sektor Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Adanya pengalihan arus lalu lintas dari dua arah menjadi satu arah pada ruas tertentu dan jam tertentu yang mengalami kemacetan guna mengurangi kemacetan dan peresmian alternative jalan Underpass di jalan dustira.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan

pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu-isu strategis perhubungan tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan pengguna jasa transportasi.
- b. Makin padatnya pengguna jalan dan masih tingginya pelanggaran lalu lintas, sehingga diperlukan infrastruktur perhubungan dan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan yang memadai serta penegakan hukum terhadap angkutan orang / barang.
- c. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung transportasi (terminal tipe C, halte dan gedung balai uji kendaraan bermotor) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
- d. Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Kota Cimahi melalui peningkatan fasilitas pendukung kerja (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.
- e. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik ruas jalan dan penanganan titik parkir On Street di wilayah Kota Cimahi.

Isu Strategis Pembangunan Perhubungan meliputi isu strategis berupa informasi yang jika tidak diantisipasi akan mengakibatkan masalah di masa datang, namun jika OPD bisa mengantisipasi akan menjadikan peluang/manfaat bagi OPD dan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan bidang perhubungan pada kurun waktu lima tahun mendatang.

Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam perumusan prioritas pembangunan tetap menjaga keterkaitannya

dengan permasalahan dan isu strategis. Adapun permasalahan pembangunan di Kota Cimahi yaitu belum terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (pelayanan jalan).

Berdasarkan RPD Kota Cimahi tahun 2023 – 2026 tentang urusan perhubungan, permasalahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi meliputi :

1. Belum optimalnya fasilitas perlengkapan dan prasarana jalan berupa marka, rambu, PJU dan guardrail.
2. Kondisi kendaraan umum yang memenuhi laik jalan belum optimal dari seluruh kendaraan wajib uji.
3. Belum optimal sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dan sesuai standar prosedur seperti terminal tipe C, halte, lahan parkir yang memadai, dan sarana prasarana perhubungan lainnya.
4. Laju pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan kuantitas dan kualitas jalan.
5. Terbatasnya tenaga ahli yang terdidik secara fungsional untuk mengembangkan kreatifitas dan ide-ide dalam pembuatan konsep perencanaan Perhubungan.

Berdasarkan permasalahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, maka isu strategis yang ditentukan dalam upaya penyelesaian permasalahan urusan perhubungan meliputi :

1. Meningkatkan fasilitas perlengkapan dan prasarana jalan, sehingga terwujudnya fasilitas perlengkapan dan prasarana jalan yang baik dan berkualitas serta memadai dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Kota Cimahi.
2. Optimalisasi peralatan alat uji dan meningkatkan SDM pengujian kendaraan bermotor sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan optimalisasi alat uji dan

peningkatan SDM Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai upaya meningkatkan pemenuhan persyaratan laik jalan angkutan umum.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dengan peningkatan jumlah, kualitas, dan pengembangan teknologi sarana prasarana perhubungan.
4. Revitalisasi dan analisis kebutuhan guna penambah jumlah halte yang selaras dengan penambahan jumlah rasio ijin trayek, meningkatkan kualitas halte yang digunakan dalam melakukan pelayanan penumpang dan menambah jumlah halte sesuai dengan analisis kebutuhan yang dilaksanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD Kota. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rencana kinerja tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Review Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kota Cimahi

No	RANCANGAN AWAL RKPD						RENJA TAHUN 2024						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					22.870.362.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					22.870.362.000	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	21 Dokumen	209.237.750		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	22 Dokumen	209.237.750	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	150.451.450		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	150.451.450	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	58.786.300		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	58.786.300	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan PD	12 Bulan	10.166.144.250		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan PD	12 Bulan	10.166.144.250	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang	10.099.052.750		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang	10.099.052.750	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	15.850.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	15.850.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 dokumen	51.241.500		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 dokumen	51.241.500	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Orang dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130 Orang	253.833.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Orang dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130 Orang	253.833.000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Cimahi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	50.000.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Cimahi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	50.000.000	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang	203.833.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang	203.833.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	12 Bulan	617.579.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	12 Bulan	617.579.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	4 Paket	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	4 Paket	10.000.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	60.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	60.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	90.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	90.000.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	202.579.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	202.579.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24.000.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	225.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	225.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	22 Unit	329.951.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	19 Unit	329.951.000	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	206.089.000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	206.089.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	123.862.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	123.862.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	10.210.762.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	10.210.762.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.985.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.985.000.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	225.762.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	225.762.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.082.855.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.082.855.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	1.043.855.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	1.043.855.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 Unit	39.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 Unit	39.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					8.287.250.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					8.287.250.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	5.745.000.000		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	5.745.000.000	
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	405 Unit	2.550.000.000		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	638 Unit	2.550.000.000	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	143 Unit	900.000.000		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	143 Unit	900.000.000	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Cimahi	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5000 Unit	1.300.000.000		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Cimahi	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5050 Unit	1.300.000.000	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Cimahi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	70 Unit	995.000.000		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Cimahi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	70 Unit	995.000.000	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase terminal tipe C yang dikelola	100 %	611.280.200		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase terminal tipe C yang dikelola	100 %	611.280.200	
		Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Kota Cimahi	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	3 Dokumen	531.507.300		Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Kota Cimahi	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	3 Dokumen	531.507.300	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Cimahi	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	79.772.900		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Cimahi	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	79.772.900	

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1 Kegiatan	295.000.000		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1 Kegiatan	295.000.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Laporan	295.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Laporan	295.000.000	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa LLAJ	11 Laporan	399.000.000		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa LLAJ	11 Laporan	399.000.000	
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	24.000.000		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	24.000.000	
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	7 Laporan	375.000.000		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	375.000.000	
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil analisis Andalin	6 Dokumen	75.000.000		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil analisis Andalin	6 Dokumen	75.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6 Laporan	22.500.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6 Laporan	22.500.000	
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kota Cimahi	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawas	12 Laporan	52.500.000		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kota Cimahi	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawas	12 Laporan	52.500.000	
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	-	-		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	-	-	
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	-	-		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	-	-	
		Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	-	-		Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	-	-	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	4 Kegiatan	106.969.900		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	4 Kegiatan	106.969.900	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2 Laporan	36.969.800		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2 Laporan	36.969.800	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	3 Laporan	55.000.100		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	3 Laporan	55.000.100	

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 Laporan	15.000.000		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 Laporan	15.000.000	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2 Laporan	12.000.000		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2 Laporan	12.000.000	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	529.999.750		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	529.999.750	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	8 unit	149.999.750		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	8 kendaraan	149.999.750	
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	26 Laporan	380.000.000		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	21 Laporan	380.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000	
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000	
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengendalian jalan raya jaringan perkotaan	1 Kegiatan	25.000.150		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengendalian jalan raya jaringan perkotaan	1 Kegiatan	25.000.150	
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.150		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.150	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	7600 Kendaraan	1.332.500.000		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	7600 Kendaraan	1.332.500.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Caoaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Caoaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	75.000.000		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	75.000.000	
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	0 Kendaraan	0		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	0 Kendaraan	0	
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4400 Dokumen	110.000.000		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4400 Dokumen	110.000.000	
		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	17.500.000		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	17.500.000	
		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2 Laporan	5.000.000		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2 Laporan	5.000.000	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	1.100.000.000		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	1.100.000.000	
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	25.000.000		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	25.000.000	
				TOTAL		32.502.112.000						32.502.112.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan, diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan kota baik rencana pembangunan tahunan, rencana jangka menengah maupun rencana jangka panjang. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk dari masyarakat terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada.

Dinas Perhubungan Kota Cimahi meliputi bidang lalu lintas, dan bidang angkutan dan penerangan jalan umum, pada umumnya kebutuhan masyarakat yang tertampung pada forum Musrenbang telah terrealisasi berdasarkan skala prioritas berupa :

- Pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU, PJL, dan PJG)
- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas untuk keselamatan jalan (rambu, speed bumper, cermin tikung dan perlengkapan jalan lainnya)
- Kelancaran lalu lintas (rekayasa lalu lintas)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kota Cimahi

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
a	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cimahi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun	4.947 Unit	PJU, PJL dan PJK
b	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cimahi	Jumlah0 Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	214 Unit	Speed Bumper, Cermin Tikung, Rambu- rambu lalu lintas

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2022 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi Nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005 – 2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran Nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2019 – 2024 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada Unit Kerja Eselon I.

Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2019 – 2024. Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2019 – 2024 dikelompokkan menjadi 3 aspek :

1. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan Keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu

menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
- b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
- c. Meningkatkan kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan.
- d. Meningkatkan Kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*.
- e. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan.
- f. Meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.
- g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*.

3. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran :

- 1) Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
- 2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
- 3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpecil dan khususnya di wilayah timur Indonesia;
- 4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;

- 5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan yang akan dicapai Kota Cimahi yang terdapat pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 adalah “Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan” dan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan”.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, sasaran yang dimuat pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yaitu “Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas” dan “Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik”.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan 4 (empat) tahun ke depan disajikan dalam tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

VISI/ MISI/ TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	TARGET INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN
[VISI] CIMAHI KOTA CERDAS	
[MISI 5] Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
[TUJUAN] 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	
[SASARAN] 1. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik 2. Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	
[IKU] 1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dishub 2. Tingkat Pelayanan Jalan (<i>Level of Services</i>)	50,5 C Predikat (0,72)

Prioritas Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan pembangunan kesatu dari tahapan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi 2023–2026 dengan strategi dan arah kebijakan seperti terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Prioritas, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024

No	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Pengembangan dan peningkatan Aksesibilitas kawasan strategis Kota	Meningkatkan manajemen dan pengendalian lalulintas serta angkutan jalan	Optimalisasi manajemen dan pengendalian lalu lintas serta angkutan jalan

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu-isu strategis tahun 2024 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi diarahkan pada :

1. Mengurai kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas dengan serangkaian kegiatan rekayasa lalu lintas dan manajemen keselamatan jalan.
2. Peningkatan kelancaran dan keselamatan lalu lintas dengan program/kegiatan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan, pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji dan manajemen rekayasa lalu lintas
3. Pelayanan Publik dengan program/kegiatan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana kantor beserta pemeliharaannya.

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi disusun berdasarkan skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sehingga dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kelancaran transportasi dengan didukung fasilitas yang memadai.

Program dan kegiatan yang disusun selama 1(satu) tahun secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								32.502.112.000					32.502.112.000
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								22.870.362.000					22.786.378.500
2	15	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								209.237.750					190.000.000
2	15	01	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Cimahi	BB Nilai	22 Dokumen	8 Dokumen	150.451.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	137.500.000
2	15	01	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Cimahi	BB Nilai	22 Dokumen	14 Laporan	58.786.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	52.500.000
2	15	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.166.144.250					10.265.500.000
2	15	01	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan PD	Kota Cimahi	BB Nilai	66 Orang / Bulan	12 Bulan	10.099.052.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	10.200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan PD	Kota Cimahi	BB Nilai	1 Laporan	12 Bulan	15.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	15.500.000
2	15	01	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan PD	Kota Cimahi	BB Nilai	13 Laporan	12 Bulan	51.241.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	50.000.000
2	15	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah								-				-	
2	15	01	2,03	5	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Bulan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2	15	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								253.833.000					435.000.000
2	15	01	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Orang dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	15	01	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Orang dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Cimahi	50,50 Nilai	3 orang	130 orang	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesionali tas ASN	51 Nilai	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2	15	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Cimahi	50,50 Nilai	130 orang	130 orang	203.833.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Profesiona litas ASN	51 Nilai	385.000.000
2	15	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								617.579.000					688.418.500
2	15	01	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	Kota Cimahi	77,5	4 Paket	12 Bulan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,75	10.650.000
2	15	01	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	Kota Cimahi	77,5	2 Paket	12 Bulan	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,75	60.000.000
2	15	01	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	Kota Cimahi	-	-	-	-	-		-	-	-
2	15	01	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	Kota Cimahi	77,5	12 Paket	12 Bulan	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,75	90.555.000
2	15	01	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	Kota Cimahi	77,5	2 Paket	12 Bulan	202.579.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,75	267.213.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	Kota Cimahi	77,5	12 Dokum en	12 Bulan	24.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,75	24.000.000
2	15	01	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	Kota Cimahi	77,5	4 Laporan	12 Bulan	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,75	6.000.000
2	15	01	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	Kota Cimahi	77,5	12 Laporan	12 Bulan	225.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,75	225.000.000
2	15	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								329.951.000					310.000.000
2	15	01	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2	15	01	2,07	5	Pengadaan Mebel	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2	15	01	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Cimahi	77,5	2 Unit	19 Unit	206.089.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,75	260.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2,07	10	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Cimahi	77,5	17 Unit	19 Unit	123.862.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,75	50.000.000
2	15	01	2,07	11	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Cimahi	-	-	-	-	-		-	-	-
2	15	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								10.210.762.000				10.043.460.000	
2	15	01	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	77,5	12 Laporan	12 Bulan	9.985.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,75	9.820.000.000
2	15	01	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2	15	01	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	77,5	60 Laporan	12 Bulan	225.762.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,75	223.460.000
2	15	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.082.855.000				854.000.000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	77,5	32 Unit	12 Bulan	1.043.855.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,75	815.000.000	
2	15	01	2,09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
2	15	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
2	15	01	2,09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	NILAI IKM Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	77,5	56 Unit	12 Bulan	39.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		NILAI IKM Perangkat Daerah	77,75	39.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							8.287.250.000				9.946.733.500		
2	15	02	2,01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							-				-		
2	15	02	2,01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	15	02	2,01	2	Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	15	02	2,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							5.745.000.000				5.422.620.900		
2	15	02	2,02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi	55 Persen	638 Unit	4 Kegiatan	2.550.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	60 Persen	2.630.854.000	
2	15	02	2,02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi	55 Persen	143 Unit	4 Kegiatan	900.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	60 Persen	524.824.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2,02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	55 Persen	5050 Unit	4 Kegiatan	1.300.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	60 Persen	1.395.327.000
2	15	02	2,02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	55 Persen	70 Unit	4 Kegiatan	995.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	60 Persen	871.615.900
2	15	02	2,03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							611.280.200				628.830.150		
2	15	02	2,03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Rasio Konektivitas Kota	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Persentase terminal tipe C yang dikelola	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2	15	02	2,03	6	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Rasio Konektivitas Kota	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Persentase terminal tipe C yang dikelola	Kota Cimahi	0,64	3 Dokumen	100 Persen	531.507.300	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Konektivitas Kota	0,64 rasio	559.494.550
2	15	02	2,03	9	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Rasio Konektivitas Kota	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Persentase terminal tipe C yang dikelola	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2	15	02	2,03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rasio Konektivitas Kota	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Persentase terminal tipe C yang dikelola	Kota Cimahi	0,64	3 Unit	100 Persen	79.772.900	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Konektivitas Kota	0,64 rasio	69.335.600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2,04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							295.000.000				294.169.000		
2	15	02	2,04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Kota Cimahi	64 Persen	19 Laporan	1 Kegiatan	295.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	64 Persen	294.169.000
2	15	02	2,06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							399.000.00				633.169.000		
2	15	02	2,06	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa LLAJ	Kota Cimahi	64 Persen	5 Laporan	11 Laporan	24.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	64 Persen	24.000.000
2	15	02	2,06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa LLAJ	Kota Cimahi	64 Persen	6 Laporan	11 Laporan	375.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	64 Persen	609.169.000
2	15	02	2,07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							75.000.000				7.250.000		
2	15	02	2,07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah dokumen hasil analisis Andalalin	Kota Cimahi	64 Persen	6 Laporan	6 Dokumen	22.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	64 Persen	2.250.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2,07	6	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Jumlah dokumen hasil analisis Andalalin	Kota Cimahi	64 Persen	12 Laporan	6 Dokumen	52.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	64 Persen	5.000.000
2	15	02	2,08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								118.969.800					308.129.350
2	15	02	2,08	2	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Cimahi	86 Persen	2 Laporan	4 Kegiatan	12.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	89 Persen	12.000.000
2	15	02	2,08	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Cimahi	86 Persen	2 Laporan	4 Kegiatan	36.969.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	89 Persen	23.165.350
2	15	02	2,08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Cimahi	86 Persen	3 Laporan	4 Kegiatan	55.000.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	89 Persen	252.387.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2,08	9	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Cimahi	86 Persen	3 Laporan	4 Kegiatan	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	89 Persen	20.576.600
2	15	02	2,09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								529.999.750				282.098.100	
2	15	02	2,09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kota	Kota Cimahi	0,64	8 Unit	2 Kegiatan	149.999.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Konektivitas Kota	0,64 rasio	151.973.800
2	15	02	2,09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Rasio Konektivitas Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	Jumlah Kendaraan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang antar Kota	Kota Cimahi	0,64	21 Laporan	2 Kegiatan	380.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Konektivitas Kota	0,64 rasio	130.124.300
2	15	02	2,11	3	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								25.000.150				116.760.900	
2	15	02	2,11	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian jalan raya jaringan perkotaan	Kota Cimahi	0,64	1 Dokumen	1 Kegiatan	25.000.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Konektivitas Kota	0,64 rasio	116.760.900
2	15	02	2,10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								500.000.000				555.531.100	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2,10	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi	64 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	64 Persen	555.531.100
2	15	02	2,05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								1.332.500.000					1.374.106.000
2	15	02	2,05	2	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	Kota Cimahi	86 Persen	3 Unit	7600 Kendaraan	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	89 Persen	50.000.000
2	15	02	2,05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	Kota Cimahi	86 Persen	0	7600 Kendaraan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	89 Persen	26.500.000
2	15	02	2,05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	Kota Cimahi	86 Persen	4400 Dokumen	7600 Kendaraan	110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	89 Persen	110.000.000
2	15	02	2,05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	Kota Cimahi	86 Persen	1 Laporan	4400 Kendaraan	17.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	89 Persen	19.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2,05	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	Kota Cimahi	86 Persen	2 Laporan	4400 Kendaraan	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	89 Persen	5.000.000
2	15	02	2,05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	Kota Cimahi	86 Persen	12 Unit	4400 Kendaraan	1.100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	89 Persen	1.137.056.000
2	15	02	2,05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	Kota Cimahi	86 Persen	4 Laporan	4400 Kendaraan	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	89 Persen	26.400.000
2	15	02	2,11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							-					-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2,11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota													
2	15	02	2,11	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio Konektivitas Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengendalian jalan raya jaringan perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	15	02	2,11	2	Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio Konektivitas Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengendalian jalan raya jaringan perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	15	02	2,11	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio Konektivitas Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengendalian jalan raya jaringan perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL												32.502.112.000					32.409.403.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi disusun berdasarkan skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sehingga dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kelancaran transportasi dengan didukung fasilitas yang memadai. Program dan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), program ini bertujuan untuk menunjang urusan kegiatan di bidang teknis Perhubungan untuk menunjang kegiatan program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 8.287.250.000,-
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program ini bertujuan untuk menunjang urusan kegiatan kesekretariatan dinas dalam mendukung kegiatan teknis perhubungan, untuk menunjang kegiatan program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 22.870.362.000,-

5.1. Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Sesuai dengan usulan rencana kinerja kegiatan untuk tahun anggaran 2023, Dinas Perhubungan Kota Cimahi mempunyai 2 Program 17 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan perhubungan baik teknis maupun urusan pendukung pemerintahan daerah. Dengan usulan pagu rencana kinerja sebesar Rp. **32.502.112.000,-** yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi. Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 seperti yang terlampir pada Tabel 3.3 diatas.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2024 ini disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas dengan prioritas pembangunan, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2024 juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka akan dilakukan:

- a) Penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b) Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2024.

Namun demikian ruang lingkup Renja Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2024 lebih diutamakan terhadap berbagai program utama Dinas Perhubungan yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Cimahi dan diharapkan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai

bagian tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan baik mulai RPJMD sampai dengan Renstra yang merupakan upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan untuk kesejahteraan rakyat khususnya di wilayah Kota Cimahi.

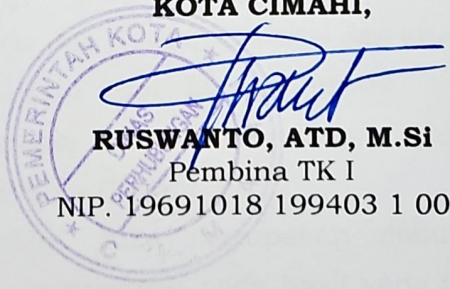
5.2 Saran

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
2. Dalam rencana kerja tahun 2024 apabila tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah serta program dan kegiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian Rencana Kerja (Renja) melalui penyusunan Perubahan Renja yang menjadi landasan penyusunan Perubahan.

Cimahi, 26 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAHI,**



RUSWANTO, ATD, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19691018 199403 1 006